STRATEGI OPTIMALISASI INOVASI KELEMBAGAAN DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN DAERAH

RACHMAT HENDAYANA[1] DAN JANES BERTHY ALFONS[2]
[1]Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian.
[2]Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku

ABSTRAK

Kajian optimalisasi inovasi kelembagaan dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah, merupakan hasil telaahan mendalam terhadap data dan informasi sekunder dari berbagai sumber yang relevan, tahun 2007. Tujuan yang ingin dicapai adalah mengetahui kondisi eksisting dan indikator kelembagaan pangan yang optimal, sehingga dapat disusun strategi pencapaian kelembagaan ketahanan pangan yang optimal di daerah. Sumber data dan informasi utama dalam bahasan ini adalah publikasi hasil kajian ketahanan pangan yang tersedia di pustaka maupun hasil penelusuran (*surfing*) internet. Melalui interpretasi dan telaah kualitatif yang dilakukan dalam pembahasan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (a) Keberhasilan ketahanan pangan, tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi semata, akan tetapi juga dientukan oleh unsur kelembagaan pendukungnya, baik yang bersifat formal maupun non formal. Teknologi menjadi syarat keharusan sedangkan kelembagaan merupakan syarat kecukupan; (b) Keberadaan kelembagaan formal maupun non formal memiliki peran strategis dan krusial dalam mewujudkan ketahanan pangan di level nasional maupun daerah dalam perannya memfasilitasi akses terhadap teknologi yang telah tersedia maupun teknologi yang diperlukan tetapi belum tersedia, menyediakan kebutuhan petani, fasilitasi modal kerja dan pemasaran; (c) Kelembagaan ketahanan pangan yang optimal dicirikan oleh konsistensinya dalam menerapkan prinsip-prinsip kelembagaan yang mencakup prinsip kebutuhan, efektivitas, efisiensi, fleksibilitas, manfaat, pemerataan dan keberlanjutan, (d) Untuk mencapai kondisi kelembagaan ketahanan pangan yang optimal diperlukan strategi diawali dengan melakukan inventarisasi elemen lembaga yang sudah ada kemudian menumbuhkan elemen lembaga yang dibutuhkan tetapi belum tersedia dan atau menumbuhkan elemen lembaga yang sudah ada tetapi belum berfungsi efektif dan efisien dalam pengelolaan pangan di daerah; dan terakhir menumbuhkan keterkaitan yang harmonis secara fungsional dan secara institusional antar elemen kelembagaan ketahanan pangan.

Kata Kunci: *Inovasi, Kelembagaan, Ketahanan pangan, Optimalisasi*

PENDAHULUAN

Isu ketahanan pangan telah menjadi salah satu fokus utama dalam kebijakan operasional pembangunan pertanian periode Kabinet Persatuan Nasional dan Kabinet Gotong Royong (1999-2004), hingga sekarang dalam Kabinet Indonesia Bersatu (2004–2009) (Salim, 2004). Pengelolaan ketahanan pangan tidak hanya terbatas untuk menyelamatkan kehidupan rumah tangga, akan tetapi dapat membawa implikasi terhadap ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas politik dan keamanan atau ketahanan nasional (Suryana, 2001).

Berkenaan dengan pengelolaan pangan, peran kelembagaan menjadi sangat penting karena secara empiris operasionalisasi pengelolaan pangan tidak hanya menjadi tanggungjawab Departemen Pertanian saja, akan tetapi juga melibatkan Instansi lain, sehingga diperlukan pengorganisasian yang optimal agar terjadi sinergisme dalam menjalankan tugasnya masing-masing.

Dalam konteks ketahanan pangan, kelembagaan yang mendukung di dalamnya tidak terbatas pada kelembagaan formal yang memiliki legalisasi hukum sebagaimana telah dikemukakan. Secara mendasar, jika ditelusuri lebih jauh ke belakang, tercapainya ketahanan pangan itu pada dasarnya berkaitan dengan keberhasilan usahatani. Sementara itu keberhasilan usahatani tidak hanya ditentukan ketersediaan teknologi. Faktor kelembagaan dalam penyiapan dan penerapan teknologi, serta mekanisme penyiapan dan penerapan teknologi juga memberikan sumbangan yang besar terhadap keberhasilan usahatani (Acoba, 2001; Basuki et al., 2000; Sulaiman, 2002).

Adanya kelembagaan ini menjadi prasyarat teradopsinya teknologi inovasi secara *sustainable* dalam pengembangan usahatani. Pengalaman terdahulu mengajarkan kepada kita bahwa adopsi teknologi tidak berlanjut setelah proyek berakhir, apabila tidak ada kelembagaan pedesaan yang mampu menyediakan kebutuhan petani seperti benih/bibit, pupuk, modal kerja, dan fasilitas pemasaran (Adimihardja, 2006).

Ketersediaan Inovasi teknologi dinilai penting (*necessary condition*), tetapi belum cukup untuk menghantarkan petani ke arah ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Syarat kecukupan (*sufficiency condition*) dalam pengelolaan pangan adalah kelembagaan yang mencakup semua elemen pendukung pengelolaan pangan dan keterkaitannya serta kebijakan pendukung pengembangan. Kelembagaan dibutuhkan untuk menghantarkan inovasi teknologi dalam pengelolaan pangan secara optimal.

Seperti halnya inovasi teknologi, dalam perumusan inovasi kelembagaan juga dibutuhkan kemampuan untuk melakukan identifikasi dan analisis aspek kelembagaan yang sedang berjalan. Melalui pemahaman yang baik tentang jenis aktivitas yang dilakukan dalam pengelolaan pangan, kinerja interaksi pelaku, dan keragaan komunalitas masyarakatnya akan dapat dirumuskan opsi solusi kelembagaan yang optimal.

Pemahaman aspek strategis operasional metodologi perumusan kelembagaan ini dinilai sangat penting dalam perumusan kelembagaan ketahanan pangan yang optimal. Pemahaman instrumen analisis kelembagaan ini dinilai penting dalam perumusan kelembagaan dan pemahaman strategi pengembangan kelembagaan pangan yang optimal. Permasalahannya adalah sejauhmanakah tingkat optimalisasi kelembagaan pangan daerah, terkait dengan upaya menanggulangi kerawanan pangan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah ?

Tulisan ini bertujuan mengetahui kondisi eksisting dan indikator kelembagaan pangan yang optimal, sehingga dapat disusun strategi pencapaian kelembagaan ketahanan pangan yang optimal di daerah. Hasil pembahasan akan dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah terkait dengan pembinaan kelembagaan pangan di daerah.

METODOLOGI

Inti dari kelembagaan adalah interaksi. Sekelompok interaksi yang berbentuk sama atau sejenis melahirkan bentuk "aktifitas". Di dalam mencapai ketahanan pangan, paling tidak terdapat empat elemen, yaitu : (1) Tersedianya pangan yang cukup yang sebagian besar berasal dari produksi sendiri; (2) Stabilitas ketersediaan pangan sepanjang tahun, tanpa pengaruh musim; (3) Akses atau keterjangkauan terhadap pangan yang dipengaruhi oleh akses fisik dan ekonomi terhadap pangan, dan (4) Kualitas konsumsi pangan serta keamanan pangan (Ariani, 2004).

Berkenaan dengan elemen tersebut, kegiatan atau aktivitas yang diperlukan adalah meliputi:

(1) Pemenuhan teknologi dalam bentuk ilmu pengetahuan dan keterampilan, dan bukan dalam bentuk barang.
(2) Pemenuhan input atau sarana produksi berupa benih, bibit, pupuk, obat-obatan, alat-alat dan mesin pertanian.
(3) Pemenuhan modal usaha baik untuk modal kerja maupun untuk kebutuhan investasi.
(4) Pemenuhan tenaga kerja untuk menangani kegiatan pengolahan lahan, pemeliharaan, panen/pasca panen, dan pemasaran hasil.
(5) Manajemen usahatani di sawah, ladang, kandang dan kolam berkaitan dengan pengelolaan usaha pertanian.
(6) Pemasaran hasil produksi yang mencakup penelusuran informasi pasar dan penjualan hasil di dalam atau ke luar desa.

Secara ringkas, pelaku pengelolaan pangan dapat dikelompokkan menjadi tiga aktor yaitu petani, aparat pemerintah, dan pelaku pasar. Ketiganya sangat berbeda dalam segala hal, mulai dari tata nilainya, sifat pekerjaannya, kulturnya, kelebihan dan keterbatasannya, dan lain-lain. Perpaduan dari ketiga pelaku ini akan melahirkan enam kombinasi yaitu: petani-petani, pemerintah-pemerintah, pasar-pasar, petani-

pemerintah, petani-pasar, dan pemerintah-pasar. Namun dalam ketahanan pangan kita hanya akan menemukan empat pola yaitu: petani-petani, petani-pemerintah, petani-pasar, dan pemerintah-pemerintah.

Data dan Sumber Data

Untuk mengungkap kelembagaan pangan di daerah, telah dikumpulkan berbagai informasi sekunder dari berbagai sumber melalui beberapa pendekatan, antara lain melalui penelusuran publikasi tentang kelembagaan, ketahanan pangan dari dokumentasi di perpustakaan beberapa instansi terkait yang relevan.

Analisis dan Interpretasi Informasi

Langkah pertama yang dilakukan terhadap informasi yang terkumpul adalah melakukan pengelompokan materi berdasarkan substansi yang terkait dengan topik-topik tertentu. Terhadap topik yang terkumpul dilakukan validasi informasi melalui telaah komparatif dan selanjutnya dikaji secara mendalam berdasarkan justifikasi kepakaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kondisi Eksisting Kelembagaan Pangan

Kelembagaan formal yang terkait dengan ketahanan pangan secara hierarhis sudah tersusun mulai dari level pusat sampai daerah, dan eksistensinya di dukung Surat Keputusan Pemerintah Pusat dan Daerah. Legalitas kelembagaan pangan di tingkat pusat, seperti Dewan Ketahanan Pangan (DKP) yang didukung beberapa kelompok kerja seperti Kelompok Kerja Ahli DKP, Sistem Informasi Ketahanan Pangan (SIKAP), dan Badan Bimas dan Ketahanan Pangan selaku Sekretaris DKP, sudah tampak solid berdasarkan dukungan Keputusan Menteri Pertanian. Kelembagaan pangan di tingkat pusat tersebut direfleksikan di level provinsi dan kabupaten dengan nama instansi yang beragam di bawah dukungan Peraturan Daerah (Perda) di masing-masing level pemerintahan. Disamping kelembagaan pangan yang sifatnya formal, terdapat juga kelembagaan pangan non formal yang berkembang di level masyarakat pedesaan.

Kelembagaan yang sifatnya informal terkait dengan pengelolaan pangan di setiap daerah kondisinya tidak sama. Hal itu tergantung pada kebijakan daerah setempat dalam memberikan apresiasi terhadap perlunya kelembagaan pangan. Namun demikian dari berbagai keragaman yang ada, intinya tidak jauh dari kondisi seperti ditampilkan dalam Gambar 1 berikut. Gambar tersebut memperlihatkan elemen kelembagaan yang ideal dalam pengelolaan pangan di daerah. Dalam prakteknya di lapangan ada yang sudah memiliki semua elemen kelembagaan tersebut secara lengkap dan aktif, ada yang lengkap tetapi belum aktif, dan ada juga yang hanya memiliki beberapa elemen saja dari kelembagaan tersebut dengan aktivitas yang juga masih terbatas.

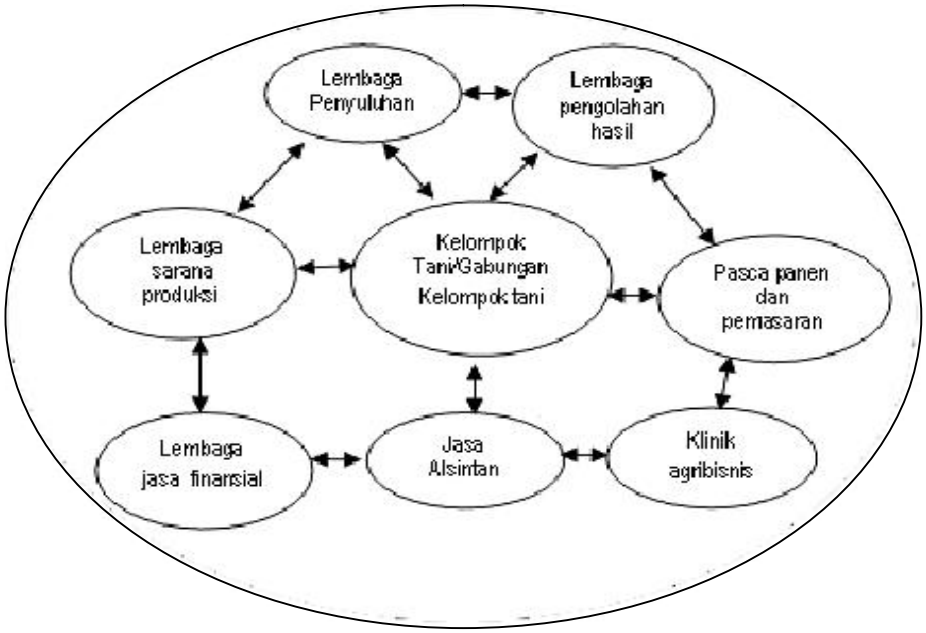

Gambar 1. Jaringan Kelembagaan Pangan Daerah

Urain berikut menyajikan deskripsi dari masing-masing elemen tersebut:

a. Lembaga produksi

Lembaga produksi merupakan elemen kelembagaan pangan yang dibentuk untuk meningkatkan efisiensi produksi pertanian, melalui pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan secara kolektif. Lembaga ini dapat berbentuk Kelompok Tani (KT) ataupun Gabungan Kelompok Tani. Apakah pembentukan KT menggunakan pendekatan domisili petani atau hamparan lahan, hal itu disesuaikan dengan kebutuhan. Yang perlu mendapat perhatian dalam pembentukan KT adalah bahwa aktivitas masing-masing individu petani dapat dikoordinir untuk mencapai tujuan bersama. Dengan kata lain, aktivitas setiap individu petani dilaksanakan berdasarkan keputusan kolektif anggota KT. Aktivitas yang dimaksud meliputi seluruh kegiatan usahatani mulai dari perencanaan kebutuhan sarana produksi, penyelenggaraan usahatani, pasca panen hingga pemasaran hasil.

b. Lembaga sarana produksi

Lembaga ini memberikan kontribusi dalam penyelarasan kegiatan pengadaan sarana produksi dalam jenis, kuantitas, kualitas, waktu, tempat, dan harga sesuai kebutuhan dan kemampuan petani dan pelaku agribisnis lainnya. Kelembagaan tersebut dapat mengkoordinasikan aktivitas pedagang sarana produksi dengan kebutuhan petani yang tergabung dalam KT.

c. Lembaga penyuluhan

Akhir-akhir ini posisi penyuluh sangat bervariasi di setiap daerah, dan umumnya eksistensi fungsi mereka dalam pengembangan agribisnis mengalami penurunan yang sangat besar. Lembaga penyuluhan berperan dalam melakukan kegiatan pendampingan pada petani. Meski bentuk organisasi penyuluh bervariasi di setiap lokasi namun misinya sama yakni terkait dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian setempat secara optimal.

d. Lembaga klinik agribisnis

Keberadaan lembaga klinik agribisnis merupakan fasilitasi peningkatan pelayanan informasi teknologi pertanian, informasi pasar dan informasi permodalan. Kenggotaan lembaga ini meliputi para penyuluh, peneliti BPTP dan petugas dinas terkait. Di dalam operasionalnya lembaga ini didukung pula oleh instansi lingkup Deptan yang berperan sebagai pemasok inovasi pertanian. Disamping mendapat dukungan dari instansi pemerintah, lembaga ini juga dapat melibatkan swasta, produsen hasil pertanian serta produsen sarana produksi pertanian.

e. Lembaga pasca panen/pemasaran hasil pertanian

Lembaga ini memiliki tujuan menekan kehilangan hasil panen atau bahan mentah pertanian, meningkatkan nilai tambah produk, dan memperlancar pemasaran hasil pertanian sesuai dengan kebutuhan pasar. Fungsi lembaga ini sangat penting dan sejauh mungkin bisa dikuasai organisasi atau kelompok tani. Hingga sekarang umumnya lembaga ini belum bisa dikuasai petani atau kelompok tani. Lembaga ini dapat merupakan bentukan baru yang dikelola oleh KT atau merupakan hasil pengembangan lebih lanjut dari lembaga yang sudah ada. Dalam pengembangannya kegiatan lembaga pasca panen/pemasaran antara lain perlu diarahkan untuk meningkatkan posisi tawar petani.

f. Lembaga jasa alsintan

Lembaga jasa alat mesin pertanian (alsintan) mengkhususkan kegiatan pada usaha pelayanan jasa penyewaan alsintan. Usaha tersebut dapat memberikan pelayanan jasa yang memadai kepada petani dan pelaku agribisnis lainnya. Dalam menjalankan fungsinya lembaga ini dapat memperoleh keuntungan yang layak dan berkesinambungan. Jika lembaga dengan jenis usaha tersebut sudah ada, maka lembaga tersebut dikembangkan dan diarahkan untuk meningkatkan efisiensi usaha dan meningkatkan pelayanannya kepada petani dengan biaya relatif terjangkau. Dalam kaitan ini sistem insentif nampaknya perlu dikembangkan, misalnya dengan membantu pelaku usaha jasa alsintan untuk memperoleh kredit murah.

g. Lembaga pengolahan hasil pertanian

Lembaga pengolahan hasil keberadaannya terkait dengan upaya meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan memperluas pasar produk. Lembaga ini dapat dirintis dengan membentuk industri pengolahan skala kecil dan rumah tangga yang dikelola secara berkelompok. Untuk menjamin kesinambungan lembaga tersebut maka usaha pengolahan yang dikembangkan harus didukung dengan pembinaan teknis dan manajemen agar dapat memberikan keuntungan yang layak. Pengembangan industri pengolahan yang sudah ada juga dapat ditempuh dan diarahkan untuk menciptakan pembagian nilai tambah secara proporsional dengan petani pemasok bahan baku atau pelaku agribisnis lain di pedesaan.

h. Lembaga permodalan

Lembaga permodalan (finansial) dapat merupakan bentukan baru atau memanfaatkan lembaga yang sudah ada tetapi belum menjangkau petani dan pelaku agribisnis lain. Penumbuhan lembaga permodalan baru dapat dirintis dengan mengembangkan pola Kredit Usaha Mandiri (KUM) yang melibatkan anggota Kelompok Tani (KT). Sedangkan pemanfaatan lembaga permodalan yang sudah ada lebih diarahkan untuk membuka berbagai hambatan penyaluran kredit kepada petani anggota KT dan pelaku agribisnis lainnya. Dalam kaitan ini peranan Pemda sebagai kekuatan politik dapat dilibatkan secara intensif.

b. Indikator Kelembagaan Pangan yang Optimal

Keberhasilan penumbuhan inovasi kelembagaan pangan harus bisa dirasakan oleh masyarakat dan sekaligus diukur secara obyektif. Bagaimana cara melakukan pengukuran terhadap kelembagaan tersebut tentu tidak harus bersifat kuantitatif dan memenuhi syarat statistik, akan tetapi dapat dilakukan secara kualitatif. Beberapa pendekatan yang bisa dilakukan untuk mengukur tingkat optimalisasi kelembagaan adalah sebagai berikut (Rusastra, 2006):

(1) Berdasar lengkap tidaknya elemen kelembagaan pangan yang terbentuk, misalnya:
- Sama sekali belum lengkap: belum ada satupun elemen kelembagaan pangan yang terbentuk.
- Belum lengkap: sudah terbentuk satu elemen kelembagaan pangan atau lebih, namun belum semua elemen kelembagaan pangan terbentuk.
- Sudah lengkap: semua elemen kelembagaan pangan sudah terbentuk.

(2) Diukur dari sudah atau belum berfungsinya elemen kelembagaan pangan yang terbentuk, misalnya:
- Sama sekali belum berfungsi: elemen kelembagaan pangan sudah terbentuk namun belum berfungsi.
- Sudah berfungsi sebagian: satu atau lebih elemen kelembagaan pangan telah berfungsi, namun belum semuanya berfungsi.
- Sudah berfungsi sepenuhnya tapi belum terintegrasi: semua elemen kelembagaan pangan telah berfungsi, namun belum sepenuhnya memiliki keterkaitan fungsional.
- Sudah berfungsi sepenuhnya dan sudah terintegrasi: semua elemen kelembagaan pangan telah berfungsi, dan antar elemen kelembagaan pangan sudah memiliki keterkaitan fungsional.

(3) Diukur dari sudah terjalin atau belumnya keterkaitan institusional antar elemen kelembagaan pangan, misalnya:
- Keterkaitan institusional sama sekali belum terbentuk: keterkaitan antar elemen kelembagaan pangan sudah terbentuk, namun keterkaitan institusionalnya sama sekali belum terbentuk.
- Keterkaitan institusional sudah terbentuk sebagian: keterkaitan antar elemen kelembagaan pangan sudah terbentuk, namun keterkatian institusional yang terbentuk baru dua atau tiga elemen kelembagaan pangan.
- Keterkaitan institusional sudah sepenuhnya terbentuk: keterkaitan antar elemen kelembagaan pangan sudah terbentuk, dan keterkaitan institusionalnya secara keseluruhan juga sudah terbentuk.

(4) Diukur dari aspek perkembangan kewirausahaan setempat, misalnya:
- Kewirausahaan sama sekali belum bisa ditumbuhkan: tidak satupun elemen kelembagaan pangan yang mampu meningkatkan efisiensinya secara ekonomi.
- Kewirausahaan sudah tumbuh, namun belum optimal: satu atau lebih elemen kelembagaan pangan mampu meningkatkan efsiiensi ekonomi, namun secara keseluruhan kelembagaan pangan belum mampu meningkatkan efisiensi ekonominya.
- Kewirausahaan sudah tumbuh optimal: seluruh atau sebagian besar elemen kelembagaan pangan mampu meningkatkan efisiensi ekonomi, dan secara keseluruhan kelembagaan pangan secara progresif juga telah mampu meningkatkan efisiensi ekonominya.

c. Strategi Perencanaan dan Pengembangan Kelembagaan Pangan

Dalam menghadapi kondisi daerah yang beragam, maka ketika dihadapkan pada upaya mencapai kelembagaan pangan yang optimal diperlukan strategi yang jitu. Uraian berikut adalah faktor-faktor yang kiranya perlu dipertimbangkan dalam menyusun strategi perencanaan dan pengembangan kelembagaan pangan.

1. Pahami *setting* masyarakat setempat. Bagaimana level kolektifitas atau individualitas masyarakat setempat? Jika kolektifitasnya tinggi maka individualitasnya rendah, begitu sebaliknya. Pada masyarakat yang kolektifitasnya tinggi, dapat dikembangkan lembaga ketahanan pangan konvensional yang bersifat non formal misalnya lumbung pangan. Jika sangat individualistis, cukup didorong untuk berhubungan dengan lembaga-lembaga ketahanan pangan formal, misalnya Badan Ketahanan Pangan (di level provinsi), Kantor Urusan Ketahanan Pangan dan Informasi Penyuluhan Pertanian dan sejenisnya yang ada di level kabupaten, dan atau kelembagaan lainnya terkait dengan ketahanan pangan di level kecamatan/desa.
2. Apa bidang pekerjaan yang dilakukan. Tiap pekerjaan atau aktifitas adalah rangkaian dari interaksi demi interaksi. Pahami bentuk, jenis, sifat dan motivitas yang mewarnai interaksi tersebut. Apakah itu semata-mata interaksi ekonomi, atau masih bercampur dengan motivasi sosial ? Interaksi pedagang dengan petani semata-mata hanya motif ekonomi (untung dan efisien), sedangkan interaksi antar petani dalam kelompok tani mungkin masih berupa campuran antara motivasi ekonomi dan sosial.
3. Pelajari kelembagaan pangan yang sudah ada di masyarakat. Apakah aktifitas yang dijalankan sudah tersedia kelembagaan yang sesuai ? Jika sudah ada, apa masalahnya: apakah masih mungkin dimanfaatkan, atau perlu diganti. Atau, hanya perlu diperkuat saja ?
4. Identifikasi dan perumusan pola kelembagaan yang sesuai untuk tiap aktifitas. Apakah lebih cocok yang berpola komunitas, atau berpola pasar, atau berpola pemerintah dengan basis pelayanan.
5. Pahami antisipasi kekentalan kelembagaan yang sesungguhnya diperlukan. Apakah cukup penguatan personal relation, cukup network saja, atau harus dibentuk organisasi yang memiliki aturan lebih ketat?

Dalam kaitan dengan strategi penyusunan perencanaan dan pengembangan kelembagaan pangan tersebut perlu mempertimbangkan tujuh prinsip dasar, sebagai berikut:

- Prinsip kebutuhan. Pertanyaan awal dalam perumusan kelembagaan pangan adalah: apakah satu atau beberapa elemen lembaga tertentu dibutuhkan secara fungsional ? Misalnya, apakah penumbuhan lembaga pasca panen dan pengolahan hasil untuk mendukung ketahanan pangan diperlukan? Jawaban pertanyaan ini sangat tergantung kepada sifat produk dan ketersediaan pasar komoditas yang dikembangkan. Untuk pengembangan komoditas sayuran penumbuhan lembaga pasca panen sangat dibutuhkan karena komoditas tersebut cepat busuk sementara konsumen membutuhkan sayuran segar. Tetapi untuk pengembangan ternak lembaga tersebut belum terlalu dibutuhkan.
- Prinsip efektivitas. Jaringan kelembagaan hanyalah sebuah alat, bukan tujuan. Sebagai alat maka elemen lembaga yang dikembangkan haruslah efektif untuk upaya pencapaian tujuan yang diinginkan.
- Prinsip efisiensi. Penumbuhan suatu elemen kelembagaan agribisnis membutuhkan dana dan waktu yang tidak sedikit. Oleh karena itu dalam penumbuhan elemen kelembagaan harus dipilih opsi yang paling efisien, yaitu yang relatif paling murah, mudah, dan sederhana namun tetap mampu mendukung pencapaian tujuan.
- Prinsip fleksibilitas. Kelembagaan yang dikembangkan disesuaikan dengan sumberdaya yang tersedia dan budaya setempat.
- Prinsip manfaat. Kelembagan yang dikembangkan adalah yang mampu memberikan manfaat paling besar bagi petani dan masyarakat pedesaan.
- Prinsip pemerataan. Kelembagaan yang dikembangkan memberikan pembagian benefit (shoring system) secara proporsional kepada setiap petani dan pengelola ketahanan pangan lainnya di pedesaan.
- Prinsip keberlanjutan. Kelembagaan ketahanan pangan yang dikembangkan diharapkan akan terus berjalan meskipun keterlibatan lembaga atau aparat pemerintah dan swasta secara langsung telah berkurang.

Mengacu pada 7 prinsip dasar di atas maka penumbuhan kelembagan ketahanan pangan di daerah memiliki 2 sifat, yaitu: (a) Penumbuhan elemen kelembagaan tidak harus sama di setiap lokasi, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan, kapasitas sumberdaya dan budaya setempat; dan (b) Elemen lembaga yang dikembangkan tidak harus bentukan baru tetapi dapat merupakan pengembangan dari elemen lembaga yang sudah ada.

Pada pelaksanaannya, pengembangan kelembagaan pangan ditempuh melalui tahapan sebagai berikut: (a) Inventarisasi elemen lembaga yang sudah ada; (b) Inventarisasi dan penumbuhan elemen lembaga yang dibutuhkan tetapi belum tersedia; (c) Inventarisasi elemen lembaga yang sudah ada tetapi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam pengelolaan pangan di daerah; (d) Menumbuhkan keterkaitan yang harmonis secara fungsional dan secara institusional antar elemen kelembagaan ketahanan pangan, dan (e) Pendampingan.

Upaya penumbuhan kelembagaan pangan merupakan bagian dari sistem inovasi kelembagaan. Kelembagaan pangan akan sulit berkembang dengan sendirinya tanpa dipicu, dibantu atau dikawal dengan cara atau oleh lembaga khusus. Untuk mempercepat dan mempertajam pencapaian terbentuknya kelembagaan pangan diperlukan bantuan dari luar berupa organisasi pendampingan. Organisasi pendampingan merupakan representasi dari masyarakat.

KESIMPULAN

- Keberhasilan ketahanan pangan, tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi semata, akan tetapi juga dientukan oleh unsur kelembagaan pendukungnya, baik yang bersifat formal maupun non formal. Teknologi menjadi syarat keharusan sedangkan kelembagaan merpakan syarat kecukupan;
- Keberadaan kelembagaan formal maupun non formal memiliki peran strategis dan krusial dalam mewujudkan ketahanan pangan di level nasional maupun daerah dalam perannya memfasilitasi akses terhadap teknologi yang telah tersedia maupun teknologi yang diperlukan tetapi belum tersedia, menyediakan kebutuhan petani, fasilitasi modal kerja dan pemasaran.
- Kelembagaan ketahanan pangan yang optimal dicirikan oleh konsistensinya dalam menerapkan prinsip-prinsip kelembagaan yang mencakup prinsip kebutuhan, efektivitas, efisiensi, fleksibilitas, manfaat, pemerataan dan keberlanjutan.

SARAN

Untuk mencapai kondisi kelembagaan ketahanan pangan yang optimal diperlukan strategi diawali dengan melakukan inventarisasi elemen lembaga yang sudah ada kemudian menumbuhkan elemen lembaga yang dibutuhkan tetapi belum tersedia dan atau menumbuhkan elemen lembaga yang sudah ada tetapi belum berfungsi efektif dan efisien dalam pengelolaan pangan di daerah. Disamping itu yang penting lagi adalah perlunya menumbuhkan keterkaitan yang harmonis secara fungsional dan secara institusional antar elemen kelembagaan ketahanan pangan.

DAFTAR PUSTAKA

Acoba, E. P. 2001. Related Issues to Promote Farmer Participation in Agricultural Technology Transfer. APEC-ATCEG Seminar on Agricultural Technology Transfer and Training. Yogyakarta, Indonesia.

Adimihardja, A., 2006. Prima Tani Merintis Pembangunan Agribisnis Industrial dan Masyarakat Pedesaan. Warta Prima Tani.Volume I Nomor I. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian.

Ariani, M. 2004. Penguatan Ketahanan Pangan Daerah Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Badan Litbang Pertanian, 2005. Pedoman Umum Program Rintisan dan Akselerasi Pemasyarakatan Inovasi Teknologi Pertanian (Prima Tani). Departemen Pertanian.

Basuki, I., Wahyu, K., Abdul Gani, J., Prisdiminggo, Sudjudi. 2000. Evaluasi Peran Penyuluh dalam Transfer Teknologi di Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan di NTB. Laporan Akhir Pengkajian Instalasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian Mataram. Proyek Pembinaan Kelembagaan Litbang Pertanian ARMP-II-NTB. Badan Penelitian dan Pengembangan Petanian. Departemen Pertanian.

Rusastra, IW. 2006. Petunjuk Teknis Pengembangan Kelembagaan Agribisnis Industrial Pedesaan (AIP). Tim Teknis Pusat Prima Tani. Badan Litbang Pertanian. Departemen Pertanian

Saliem, H.P. Rachman. 2004. Indikator Penentu, Karakteristik, Dan Kelembagaan Jaringan Deteksi Dini Tentang Kerawanan Pangan. Icaserd Working Paper No. 46. No. Dok.058.46.04.04. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian Jl. A. Yani No. 70 Bogor 16161.

Suryana. 2001.Tantangan dan Kebijakan Kektahanan Pangan. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat untuk Mencapai Ketahanan Pangan dan Pemulihan Ekonomi. Departemen Pertanian. Jakarta 29 Maret.

Sulaiman, F. 2003. Program Informasi, Komunikasi dan Diseminasi Teknologi Pertanian. Makalah disajikan dalam Lokakarya Sinkronisasi Program Penelitian & Pengkajian Teknologi Pertanian Bogor, 1 – 3 Mei 2003.